

Universitas Medan Area

# PENGANTAR ILMU POLITIK

DIKTAT

Disusun oleh :

Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.I.P.



# DAFTAR ISI

Ilmu Politik .....	3
Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik.....	8
Pemikiran Negara dan Negara .....	13
Pembagian Kekuasaan Negara secara Vertical dan Horizontal .....	17
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif .....	21
Sistem Politik.....	25
Demokrasi .....	29
Sosialisasi Politik .....	34

## ILMU POLITIK

### 1. ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

- Tahun 1948 : para sarjana ilmu politik melakukan pertemuan di Paris merumuskan : Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu (*the sum of coordinated knowledge relative to a determined subject*).
- Tahun 1950-an : ternyata banyak para ilmuwan sarjana ilmu politik yang tidak puas dengan perumusan yang luas ini, karena tidak mendorong para ahli untuk mengembangkan metode ilmiah. Muncullah pendekatan perilaku (*behavioral approach*) yang merupakan gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari suatu *new science of politics*. Gerakan baru ini dapat disebut revolusi dalam ilmu politik, merumuskan pokok pemikiran : sekalipun perilaku manusia kompleks, tetapi ada pola-pola berulang yang dapat diidentifikasi. Pola-pola dan keteraturan perilaku ini dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan yang teliti dan sistematis.
- Dekade 1960-an : timbul reaksi terhadap pendekatan perilaku oleh kelompok pasca-perilaku (*post-behavioralist*). Kritis yang dikemukakan adalah pendekatan perilaku terlalu kuantitatif dan abstrak, sehingga tidak mencerminkan realitas sosial. Berbeda dengan para behavioralis yang berpendapat bahwa nilai tidak boleh masuk dalam analisis keadaan sosial, kelompok post-behavioral berpendapat bahwa nilai-nilai boleh masuk dalam analisis keadaan sosial. Nilai-nilai harus diteliti dan para ilmuwan melibatkan diri secara aktif untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

#### **Pendekatan Tradisional (*Institutional Approach*)**

Isi kajian dan Ciri :

- ✓ Filsafat
  - Normatif : menjelaskan yang seharusnya, bukan keadaan yang sebenarnya.
  - Perspektif : paduan mana yang baik dan buruk.
- ✓ Sejarah
  - Historis : kajiannya tentang masa lampau.
  - Deskriptif : bersifat paparan
- ✓ Hukum
  - Legal konstitusional : Lembaga formal.
- ✓ Metode
  - Kualitatif : tidak memakai bantuan statistik dan matematika.
- ✓ Lainnya :
  - Sarat nilai : syarat-syarat baik dan buruk dalam masyarakat.
  - Pendekatan tradisional gagal dalam pembangunan teori.

#### **Pendekatan Perilaku /Tingkah Laku (*Behavioral Approach*)**

- ✓ Pada pendekatan perilaku ini:
  - Pembahasan struktur berubah menjadi pembahasan proses.
  - Pembahasan lembaga berubah menjadi pembahasan perilaku.
- ✓ Isi kajian : Sosiologi, Psikologi dan Antropologi.
- ✓ Ciri-ciri : Empirik, analitis, perilaku individu dan kelompok (non formal), bebas nilai, berhasil dalam *theory building*, metode kuantitatif.
- ✓ Kekecawaan terhadap pendekatan perilaku :
  - Hanya mementingkan pembangunan teori, tanpa mengindahkan kebutuhan “aksi” dan “relevansi”
  - Aspek “kuantitatif” dalam banyak hal dianggap terlalu menyederhanakan kesimpulan.
  - “norma-norma” politik ditinggalkan oleh penganut perilaku.

### **Pendekatan Pasca-Tingkah Laku (*Post-Behavioral Approach*)**

Beberapa ciri:

- ✓ Dalam usaha mengadakan penelitian empirik dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan dengan masalah-masalah sosial. Revolusi pada masalah-masalah masyarakat lebih penting daripada kecermatan.
- ✓ Bersifat konservatif, karena terlalu menekankan keseimbangan dalam sistem dan kurang member peluang-peluang pada perubahan.
- ✓ Dalam penelitian, nilai-nilai tidak boleh dihilangkan. Ilmu tidak boleh *value free* dalam evaluasinya.
- ✓ Cendekiawan mempunyai tugas historis melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan.
- ✓ Sarjana harus *action oriented*. Membentuk masyarakat yang lebih baik.
- ✓ Cendekiawan tidak boleh menghindari perjuangan dan harus turut mempolitisasi organisasi-organisasi profesi dan lembaga-lembaga ilmiah.

Hasilnya :

- ✓ Pendekatan membaaur satu sama lain.
- ✓ Pendekatan deskriptif dilengkapi dengan analisis pelaku-pelakunya.
- ✓ Nilai-nilai dan norma didudukkan kembali pada tempatnya yang terhormat.

## **2. TEORI POLITIK**

- ✓ Definisi Teori Politik

**Menurut Miriam Budiardjo** teori Politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas : 1. Tujuan dari kegiatan politik. 2. Cara-cara mencapai tujuan itu. 3. Kemungkinan-

kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu. 4. Kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain: masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya.

**Menurut Germino** teori Politik sebagai “studi kritis tentang prinsip-prinsip pengaturan yang benar dalam eksistensi sosial manusia”. Jadi teori politik itu sebuah “ilmu” tapi bukan ilmu yang membatasi diri pada kata-kata yang dapat dibuktikan dengan panca indera. Sebagai ilmu teori politik meliputi pengetahuan fakta dan pengertian tentang cara pengetahuan ini diserap dan nila-nilai.

### 3. DEFINISI ILMU POLITIK dan DEFINISI POLITIK

#### **Menurut Robert Dahl**

Ilmu politik adalah ilmu mengenai politik. Ada yang mengatakan suatu sistematis ilmu politik daripada suatu usaha dari analisis sistematis untuk menemukan kerumitan yang membingungkan yang lebih spesifik lagi apapun prinsip yang dapat bertahan dari yang lebih luas dan lebih umum secara signifikan.

Politik adalah hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan.

#### **Menurut G. A. Jacobsen dan W. H. Lipman**

Ilmu politik adalah ilmu dari negara, berisi tentang:

1. Hubungan individu dengan yang lainnya sejauh negara mengatur mereka lewat hukum
2. Hubungan individu-individu atau kelompok dari individu-individu pada negara
3. Hubungan dengan negara

#### **Menurut Miriam Budiardjo**

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan atau alokasi dari sumber-sumber dan *resources* yang ada.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun

menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.

Dari uraian diatas teranglah bahwa konsep-konsep pokok dalam ilmu politik adalah: 1. Negara (*state*) ; 2. Kekuasaan (*power*) ; 3. Pengambilan keputusan (*decision making*) ; 4. Kebijakan (*policy*) ; 5. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

#### 1. Negara

Menurut Miriam Budiardjo → negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

Menurut J. Barents → ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.

#### 2. Kekuasaan

Menurut Miriam Budiardjo → kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Menurut Harold D. Laswell dan A. Kaplan → ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.

#### 3. Pengambilan Keputusan

Menurut Miriam Budiardjo → keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih antara beberapa alternatif, yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Joyce Mitchell → politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.

#### 4. Kebijakan Umum

Menurut Miriam Budiardjo → kebijaksanaan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam

usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Menurut David Easton → ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum. Dikatan lebih jauh bahwa kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu.

#### 5. Pembagian

Menurut Miriam Budiardjo → pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat.

Menurut David Easton → sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara otoritatif (berdasarkan) untuk dan atas nama masyarakat.

### **PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK**

- Pendekatan adalah standart atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data mana yang akan diteliti dan data mana yang dikesampingkan.
- Pendekatan ibarat sebuah teropong. Pendekatan dalam keilmuan memberikan kerangka berpikir dalam menilai suatu obyek ilmu, dan diperlukan dalam analisis ilmu politik.
- Pendekatan yang digunakan akan mempengaruhi proses dan hasil analisa yang dilakukan.
- Vernon van Dyke mengatakan bahwa “Suatu pendekatan (*approach*) adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan.

Beberapa pendekatan ilmu politik yang terdapat dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik Prof. Miriam Budiardjo, terbagi menjadi beberapa aspek dan jenis pendekatan, yaitu:

### **1. Pendekatan Legal/Institusional**

Pendekatan Legal/Institusional dan sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok dalam pendekatan ilmu politik, khususnya dalam segi konstitusional (Undang-Undang Dasar, Kedaulatan, Kedudukan dan Kekuasaan formal) dan dalam segi yuridis (lembaga-lembaga kenegaraan; parlemen, badan eksekutif dan yudikatif).

Pendekatan ini cenderung bersifat formal karena terdapat prosedur-prosedur tertentu dalam proses dan praktiknya. Selain itu pendekatan ini juga bersifat statis dan deskriptif dan banyak memakai ulasan sejarah atau pengalaman di masa lalu.

Proses pembahasan hal ini lebih cenderung kepada “fakta” bukan terhadap norma (ideal atau standar yang harus menjadi pedoman untuk perilaku).

Dalam realita yang terjadi, pendekatan ini pun sering bersifat normatif (hanya pada nilai ideal dan standar tertentu) dengan mengasumsikan norma-norma Demokrasi Barat. Dalam hal ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal (*a body of formal constitutional norms*), dan hal ini kurang memberikan peluang bagi terbentuknya teori-teori baru karena bahasannya terbatas.

Namun, pada pertengahan dasawarsa 1930-an beberapa sarjana di Amerika dari Mazhab Chicago mulai mengemukakan suatu pandangan yang lebih melihat politik sebagai kegiatan atau proses, dan negara sebagai sarana perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Bagi mereka esensi politik adalah kekuasaan, terutama kekuasaan untuk menentukan kebijakan publik.

Dalam poin pertama ini dijelaskan bahwa pendekatan ini cenderung mendesak konsep kekuasaan dari kedudukan sebagai satu-satunya faktor penentu, sehingga hanya menjadi salah



satu dari sekian banyak faktor dalam proses membuat dan melaksanakan keputusan. Maka dari itu terjadi pendobrakan terhadap pendekatan ini. Pendobrakan yang terjadi terhadap pendekatan tradisional ini menjadi proses tumbuhnya Pendekatan Perilaku (*Behavioral Approach*).

## 2. Pendekatan Perilaku

Pendekatan Perilaku muncul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia II. Sebab – sebab kemunculan pendekatan ini :

- a. Sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan, karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan.
- b. Adanya kekhawatiran, jika ilmu politik tidak maju dengan pesat dan akan ketinggalan dibanding ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi, antropologi dan psikologi.
- c. Di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik.

Pemikiran pokok dari Pendekatan Perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal (yang tidak dianggap sebagai sentral atau aktor yang independen), karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya dan lebih bermanfaat untuk mempelajari perilaku (*behavior*) manusia itu sendiri, karena manusia merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Di satu sisi pembahasan perilaku bisa saja terbatas, tetapi di sisi lain hal tersebut bisa mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan kelompok elit, gerakan nasional, atau suatu masyarakatan politik (*polity*).

Ciri khas pendekatan perilaku ialah orientasi yang lebih mengilmiahkan ilmu politik, seperti konsep pokok yang oleh David Easton (1962) dan Albert somit (1967) uraikan :

1. Perilaku politik menampilkan keteraturan (*regularities*), dengan proses verifikasi dan dikuantifikasikan melalui data statistik dan matematik.
2. Usaha membedakan secara jelas antara norma dan fakta.
3. Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi si peneliti, bebas-nilai (*value-free*).
4. Pelatihan harus sistematis dan menuju pembentukan teori (*Theory Building*).
5. Ilmu politik harus bersifat murni (*pure science*), sebagai *problem solving*, dan ilmu politik harus terbuka dan terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya.

Ciri khas Pendekatan Perilaku ini ialah pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial.

### **Kritik Terhadap Pendekatan Perilaku**

Terdapat beberapa pihak yang mengkritik Pendekatan Perilaku, diantaranya adalah kalangan tradisionalis, kalangan Neo-Marxis, termasuk kalangan penganut itu sendiri (behavioralis). Hal ini tidak terlepas dari kritik karena ketidak sempurnaan yang terjadi dalam implementasinya.

Kemudian, Pelopor Pendekatan Perilaku mencoba mengevaluasi dan mengoreksi teori ini. Sehingga terlahirnya pembaharuan dari Pendekatan Perilaku dan dikembangkan menjadi Pendekatan Pasca-Perilaku.

## **4. Pendekatan Neo-Marxis**

Kebanyakan kalangan Neo-Marxis adalah cendikawan yang berasal dari kalangan “borjuis” dan seperti cendikiawan di mana-mana, enggan menggabungkan diri dalam organisasi besar seperti partai politik atau terjun aktif dalam kegiatan politik praktis. Hanya ada satu atau dua kelompok yang militan, antara lain golongan Kiri Baru (*New Left*).

Ada dua pemikiran Marx yang menarik dalam pembahasan Pendekatan Neo-Marxis ini. *Pertama*, ramalan tentang runtuhnya kapitalisme yang tidak terelakan. *Kedua*, etika humanis yang meyakini bahwa manusia pada hakikatnya baik, dan dalam keadaan tertentu yang mengentungkan akan dapat membebaskan diri dari lembaga-lembaga yang menindas, menghina, dan menyesatkan.

Salah satu kelemahan yang melekat pada golongan Neo-Marxis adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang sudah banyak berubah. Fokus analisis Neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Mereka penganut Pendekatan ini mengecam analisis struktural-fungsional dari para behavioralis karena terlampau mengutamakan harmoni dan keseimbangan sosial dalam suatu sistem politik.

## **5. Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*)**

Kalangan Teori ini yang juga berada dalam rangka teori-teori kiri adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara Dunia Pertama (negara-negara maju) dan Dunia Ketiga (negara-negara kurang maju). Teori ini lebih berpengaruh kepada negara

ketiga atau negara kurang maju dalam kerugiannya, dan negara maju justru berpengaruh dalam keuntungannya. Ada dua hal yang dalam keberpengaruh tersebut.

*Pertama* negara bekas jajahan (negara ketiga) dapat menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, semua hal itu menjadi investasi yang menguntungkan bagi negara pertama (penjajah atau negara maju).

*Kedua*, negara kurang maju (negara ketiga) dapat menjadi pasar untuk hasil produksi negara maju dan hal ini adalah kegiatan eksploitasi yang menyebabkan negara-negara kurang maju mengalami kemiskinan terus-menerus.

## **6. Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational Choice*)**

Dalam Pendekatan ini, pelopor dan penganutnya melakukan cara-cara yang realistis dalam pendekatan ilmu politik. Sehingga dalam hal ini merujuk kepada konsensus, hal ini menunjukkan adanya hal pluralis dalam bermacam-macam pandangan politik.

Pendekatan ini memunculkan cara-cara realistis dalam politik, seperti *voting* yang dilakukan dalam proses politik, metode-metode yang dilakukan secara lebih statis dan matematis dan lain-lain.

Menurut penganut pandangan ini, inti dari politik adalah individu sebagai aktor penting dalam dunia politik. Karena manusia adalah individu yang rasional, maka ia selalu memberikan hal-hal rasional sebagai pilihan dan ia pun mempunyai keharusan untuk menentukan pilihan.

Dalam kalangan pendekatan ini juga terdapat beberapa perbedaan-perbedaan penjelasan didalamnya, oleh James B. Rule sebagai berikut:

1. Tindakan manusia (*human action*) pada dasarnya adalah “instrumen” (alat bantu).
2. Para aktor dalam pendekatan ini merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi, untuk mendapatkan informasi yang relevan
3. Proses-proses sosialnya berkala besar.

Aplikasi teori ini sangat kompleks, mulai dari pola-pola *voting* sampai pada analisis yang matematis. Melihat dari hal tersebut Pendekatan ini sangat berjasa untuk mendorong usaha kuantifikasi dalam ilmu politik dan mengembangkan sifat empiris tentang bukti kebenaran ketimbang abstraktif dan spekulatif.

## **7. Pendekatan Institusionalisme Baru**

Disebut Institusionalisme Baru karena pendekatan ini merupakan penyimpangan dari Institusionalisme Lama. Pendekatan ini merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lainnya, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi serta bidang-bidang lainnya.

Institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Menurut Jan-Erik dan Svante Ersson, institusi mencakup (1) Struktur fisik, (2) Struktur demografis, (3) Perkembangan historis, (4) Jaringan Pribadi, dan (5) Struktur sementara (keputusan-keputusan sementara).

Kalangan penganut pendekatan ini ada yang mengatakan bahwa “Politik adalah cara manusia mengatur diri sendiri”, yang kemudian muncul bermacam-macam institusi dari berbagai macam peraturan yang dibuat.

Inti dari Institusionalisme Baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin, sebagai berikut :

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang di batasi secara kolektif.
2. Pembatasan-pembatasannya terdiri dari, a) pola norma dan pola peran, b) perilaku dari mereka yang memegang peran.
3. Banyak juga pembatasan-pembatasan tersebut menguntungkan individu atau kelompok dalam sebuah institusi.
4. Hal di atas terjadi karena faktor-faktor yang membatasi individu atau kelompok, sehingga membentuk preferensi dan motivasi bagi aktor dan kelompok.
5. Pembatasan-pembatasannya bersifat historis
6. Pembatasan-pembatasannya memberikan, mewujudkan dan memelihara peluang juga kekuatan bagi setiap individu dan kelompok.

## **PEMIKIRAN NEGARA DAN NEGARA**

### **I. PEMIKIRAN NEGARA**

**Pemikiran Socrates** : Socrates sangat kritis dalam mempertanyakan sesuatu yang dianggap benar dan tidak percaya kepada kebenaran tanpa melakukan penyelidikan. Menurut filsuf ini untuk mencapai kebajikan (*virtue*) manusia harus memiliki pengetahuan dan tolak ukur mengenai apa yang baik dan buruk. Tujuan tertinggi kehidupan manusia memuat dirinya atau jiwanya secara menyeluruh tumbuh dan berkembang serta menjadi sebaik mungkin dan mampu diraih bila manusia memiliki hakikat yang baik.

Menurut Socrates tugas Negara adalah memajukan kebahagiaan para warga negaranya dan membuat jiwa mereka menjadi sebaik mungkin. Seseorang penguasa harus mempunyai pengertian tentang “yang baik”. Socrates tidak menyetujui konsep Demokrasi yang didasarkan pada suara mayoritas karena menurut beliau tidak semua orang (dalam mayoritas) memiliki pengetahuan yang baik.

**Pemikiran Plato** : Menurut Plato Negara Ideal menganut prinsip mementingkan kebajikan. Karena kebajikan menurut Plato sebuah pengetahuan. Segala hal yang dilakukan atas nama negara haruslah dimaksud untuk mencapai kebajikan itu. Plato juga beranggapan bahwa munculnya Negara karena adanya hubungan timbal balik dan rasa membutuhkan antara sesama manusia.

Negara ideal Plato juga didasarkan pada prinsip atas larangan kepemilikan pribadi, baik dalam bentuk uang, harta, keluarga, anak dan istri. Inilah yang disebut *nihilism social*. Dalam konteks inilah Plato juga mengemukakan gagasan tentang hak kepemilikan bersama, kolektivisme, atau komunisme. Intinya adalah gagasan anti individualism. Plato juga mengungkapkan bahwa sistem negara demokrasi akan melahirkan pemerintahan tirani dan juga dalam negara demokrasi, kebebasan individu dan pluralism politik adalah dewa yang diagungkan. Semua warga negara memiliki kebebasan dalam mengekspresikan aspirasi tanpa merasa khawatir akan intervensi negara terhadap kebebasan itu. Dalam istilah Plato demokrasi itu “penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sekehendak hati” dan akhirnya kekerasan dibenarkan atas nama kebebasan dan persamaan hak.

**Pemikiran Aristoteles** : Berbeda dengan Plato, Aristoteles membenarkan hak milik individu. Karena menurut Aristoteles hak milik penting karena memberikan tanggung jawab kepada seseorang untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial dan menurut Aristoteles hak milik akan memungkinkan orang untuk memikirkan persoalan negara.

Aristoteles beranggapan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, makhluk yang berpolitik sesuai watak alamiahnya. Negara terbentuk karena adanya manusia yang saling membutuhkan. Menurut Aristoteles Negara merupakan lembaga politik yang paling berdaulat, meski bukan Negara tidak memiliki batasan kekuasaan. Tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya, bukan individu-individu tertentu. Tujuan lainnya adalah memanusiakan manusia.

Referensi : Suhelmi, Ahmad, 2001. *Pemikiran Politik Barat*. PT. Gramedia Utama, Jakarta.

## II. NEGARA

### 1. Pengertian Negara

Menurut **Hukum Tata Negara** → Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

**Bluntschli** → Negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.

**C.F Strong** → Negara merupakan masyarakat yang terorganisir secara politik.

**Djokosoetono** → Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

**Hugo de Groot** → Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.

**Miriam Budiardjo** → Negara adalah suatu territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah.

### 2. Syarat-syarat berdirinya Negara

Menurut Inu Kencana Syafie ada empat syarat pokok berdirinya suatu negara yaitu :

- a. Adanya pemerintah
- b. Adanya wilayah
- c. Adanya warga negara
- d. Adanya pengakuan

**a.Pemerintah** → Istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.

Menurut Ramlan Surbakti pemerintahan dan pemerintah dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Demikian pula dengan pengertian pemerintah dalam arti luas yang berarti seluruh aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit menyangkut aparat eksekutif, yakni kepala pemerintahan dalam kabinet.

**b.Wilayah** → Menurut Inu Kencana Syafei, wilayah adalah lokasi atau area tertentu, dengan segala kandungan potensi wilayah tersebut, dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan mulai dari

laut, darat dan udara, baik yang sifatnya fisik dan non fisik, secara kompleks menyangkut keseluruhan tata ruang dan sumber kekayaan alam yang terkandung didalam tempat tersebut.

**c. Warga Negara** → adalah mereka yang dinyatakan sebagai warga oleh suatu negara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut.

**d. Pengakuan** → Menurut Inu Kencana Syafei pengakuan dibagi menjadi menjadi dua kategori :

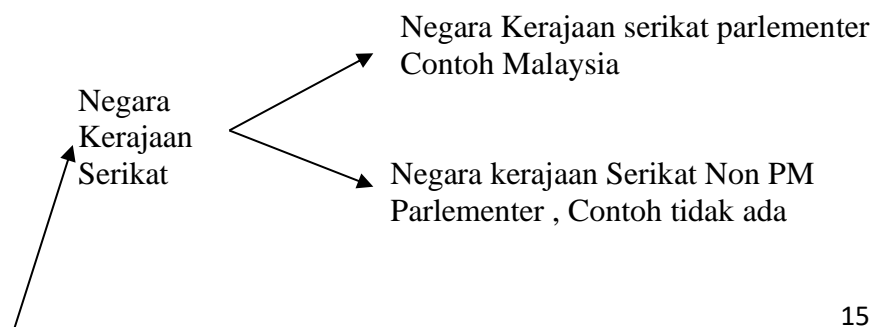
*pertama*, pengakuan dari dalam negeri dimaksudkan sebagai kerelaan warga negara untuk diperintah oleh pemerintahan yang sah, dan

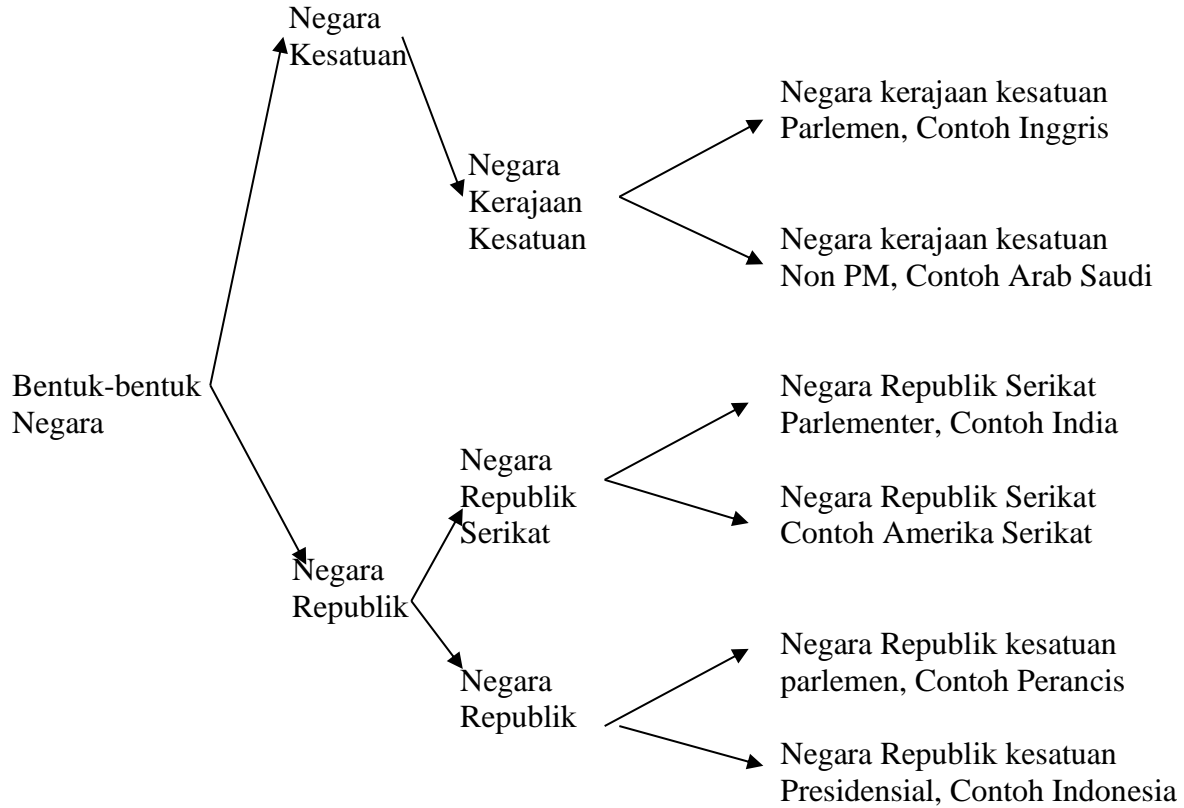
*kedua*, pengakuan dari luar negeri dimaksudkan sebagai kerelaan negara-negara lain untuk mengakui keberadaan suatu negara merdeka dan pemerintah yang menguasainya sebagai pemerintah yang berdaulat.

### 3. Bentuk-bentuk Negara

- a. Negara Kerajaan : kepala negaranya dijabat secara turun menurun, dengan gelar berbagai jenis misalnya kaisar, raja, ratu, sultan, maharani, syah, atau lain-lain sesuai budaya negara tersebut. Sedangkan kepala pemerintahannya yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif) dapat diserahkan kepada Perdana Menteri (PM) yang memimpin kabinet (dewan menteri-menteri) atau dapat pula dijabat sendiri oleh kepala negara tersebut di atas.
- b. Negara Reepublik adalah suatu negara yang kepala negaranya dijabat oleh seorang presiden. Seperti juga dengan negara kerajaan, negara republik juga dapat memiliki perdana menteri yang akan memimpin kabinet, yang sudah tentu presiden (kepala negara) terpilih tidak lebih dari sekedar symbol, kecuali sistem pemerintahannya memberikan dominan kepada presiden, yaitu dengan jalan tidak dapatnya presiden dijatuhkan mosi tidak percaya parlemen (legislatif), hal ini dicantumkan oleh konstitusi negara tersebut. Tetapi apabila presiden selain kepala negara juga sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintahan yang memimpin kabinet, maka negara tersebut berarti menganut sistem pemerintahan yang presidensial.

Baik negara kerajaan maupun republik, keduanya dapat dibagi lagi atas bentuk serikat (kerajaan serikat dan republik serikat) atau bentuk kesatuan (kerajaan kesatuan dan republik kesatuan), perbedaan ini tergantung kepada besar kecilnya sentalisasi atau desentralisasi (pendemokrasian daerah) yang diberikan suatu negara itu dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk lebih jelas lihat gambar dibawah ini.





Referensi:

Budiardjo, Miriam. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kencana, Inu Syafei. (1997). *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.

## PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL

Secara visual Nampak bahwa kekuasaan dapat dibagi menjadi dua cara :

Secara **Vertikal** yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya dan dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J. Friedrivh



memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial (*territorial division of power*). Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan jika kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal dan konfederasi.

Secara **Horizontal**, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antar fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika pembagian kekuasaan (*division of power*).

### Pembagian Konfederasi, Negara Kesatuan, dan Negara Federal

Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalism.

#### ➤ Konfederasi

Menurut L. Oppenheim : Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara dari negara-negara itu.

#### ➤ Negara Kesatuan

Menurut C. F. Strong : Negara kesatuan adalah bentuk dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Dengan kata lain, kekuasaan atau kedaulatan sepenuhnya ada di pemerintah pusat bukan di pemerintah daerah yang kita kenal sebagai hak otonomi atau desentralisasi. Adapun ciri-ciri mutlak negara kesatuan, menurut Strong adalah adanya supremasi dari dewan perwakilan pusat dan tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat.

➤ Menurut K. C. Wheare : Negara federal ialah kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Pernyataan tersebut diatas diartikan, baik negara bagian maupun negara federal memiliki kedaulatan masing-masing. Kedaulatan negara federal adalah mengatur segala hal di luar kedaulatan negara bagian dan berlaku untuk beberapa negara bagian lainnya. Adapun persyaratan sebuah negara federal, menurut C. F. Strong adalah adanya perasaan sebangsa diantara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu dan keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi untuk membentuk ikatan terbatas.

### **Perbedaan antara Konfederasi dan Negara Federal**

Untuk membedakan antara konfederasi dan negara federal, kita dapat melihat dari dimana letak kedaulatannya. Seperti yang dijelaskan diatas, kedaulatan konfederasi terletak dinegara-negara pesertanya, sedangkan kedaulatan federal terletak pada federasi itu sendiri bukan di negara bagiannya.

Pandangan yang lain membedakan konfederasi dan negara federal berdasarkan keterikatan warga negara oleh peraturan pusat. Jika seorang warga negara sebuah negara bagian langsung terikat oleh peraturan organ pusat maka negara tersebut adalah federasi, jika tidak maka konfederasi.

### **Perbedaan antara Federasi dan Negara Kesatuan**

Mengenai perbedaan antara federasi dan negara kesatuan, pernyataan R. Kraunbergburg adalah sebuah negara bagian dalam federasi memiliki wewenang untuk menciptakan undang-undang dan bentuk organisasinya sendiri, sedangkan pemerintahan daerah pada negara kesatuan tidaklah memiliki wewenang secara penuh melainkan harus mengikuti garis besar yang telah ditetapkan oleh negara tersebut.

### **Federalisme di Indonesia (Republik Indonesia Serikat, Desember 1949 – Agustus 1950)**

Proses pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) di Indonesia terjadi pada tanggal 27 desember 1949 sampai dengan 17 agustus 1950. Pada masa yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik.

Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya.
2. Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri.
3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen.
4. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun harus melalui keputusan pemerintah
5. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet.
6. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Republik Indonesia Serikat (RIS) terdapat banyak pertentangan dan keadaan Indonesia pada waktu itu semakin memburuk. Ternyata dalam waktu delapan bulan saja bentuk federal sudah dibatalkan digantikan dengan bentuk negara kesatuan.

### Konsep Trias Politika : Pemisahan Kekuasaan Menjadi Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya yang dikenal dengan Trias Politika. Trias Politika merupakan sebuah konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan yang berfungsi untuk mencegah timbulnya sebuah kekuasaan yang absolute yang pada akhirnya akan berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Tokoh-tokoh yang mengusung konsep ini adalah John Locke dan Montesquieu. Trias Politika yang diusung Locke memisahkan kekuasaan antara kekuasaan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan juga mengadili, dan federatif yang memiliki kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, yang masing-masing kekuasaan terpisah satu dengan yang lainnya.

Sedangkan Trias Politika yang diusung oleh Montesquieu memisahkan kekuasaan antar legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

#### Trias Politika di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang menganut paham Trias Politika yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif yaitu DPR → Pasal 20 ayat (1), memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
2. Kekuasaan eksekutif yaitu Presiden → Pasal 4 ayat (1) memegang kekuasaan pemerintahan
3. Kekuasaan Yudikatif yaitu MK dan MA → Pasal 24 ayat (1) memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Trias politika yang dipakai di Indonesia saat sekarang adalah pemisahan kekuasaan. Salah satu buktinya dalam hal membentuk undang-undang. Saat ini presiden dapat mengajukan rancangan Undang-undang.

DPR selain memegang kekuasaan membentuk Undang-undang, dalam melakukan pengawasan memiliki:

- Hak angket yaitu menanyakan kepada presiden mengenai hal-hal yang mengganggu kepentingan nasional
- Hak interpelasi yaitu untuk melakukan penyelidikan

Sistem presidensil di Indonesia setelah amandemen UUD 1945:

- Adanya kepastian mengenai masa jabatan presiden
- Presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan
- Adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi ( *check and balance*)
- Adanya mekanisme impeachment/pemakzulan

MK dan MA memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diatur pada pasal 24, 24A, 24B, 24C, 25 UU NKRI 1945 dan UU No. 4 tentang kekuasaan kehakiman. Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah bebas dari intervensi ekstra yudisial. Tugas hakim yaitu menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF**

### **EKSEKUTIF**

Di negara-negara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden, beserta, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer, sedangkan dalam arti sempit presiden dan menteri-menterinya.

.Dalam sistem presidensial menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab”, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat”.

#### ➤ Tugas

Tugas badan eksekutif, menurut tafsir tradisional azas *trias politica* hanya melaksanakan kebijakan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi dalam zaman modern pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang gerakannya, zaman modern telah menimbulkan bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan eksekutif, lebih luas ruang lingkup kekuasaan badan eksekutifnya.

#### ➤ Wewenang

Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang :

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
2. Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.
3. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
4. Yudikatif, memberikan grasi, amnesti, dan sebagainya.
5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan dengan negara-negara lain.

#### ➤ Badan Eksekutif di Indonesia

- ✓ Masa pra-Demokrasi Terpimpin (November 1945 – Juni 1959) : badan eksekutif terdiri dari Presiden dan wakil Presiden ( yang tidak dapat diganggu gugat), menteri-menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri, kabinet merupakan kabinet yang dipimpin oleh wakil Presiden Moh. Hatta (dinamakan kabinet Presidensial).
- ✓ Juni 1959 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali : badan eksekutif terdiri atas seorang presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri. Presiden dan wakil Presiden dipih oleh MPR dan presiden merupakan “Mandataris” MPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan selama 5 tahun, Presiden tidak boleh dijatuhkan oleh DPR, sebaliknya Presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR.
- ✓ Masa Demokrasi Terpimpin : tidak ada wakil Presiden, MPRS menetapkan Presiden seumur hidup, legislatif dan yudikatif diberi status menteri (jumlah menteri lebih dari 100 orang).

- ✓ Masa Orde Baru : ketetapan MPRS yang memberikan kedudukan Presiden seumur hidup dibatalkan, Jenderal Soeharto dipilih oleh MPRS sebagai presiden dan tidak memiliki wakil, jumlah menteri dikurangi menjadi 23 orang. Kemudian sidang tahun 1973 MPR memilih Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil Presiden. Sistem presidensial yang digunakan oleh UUD 1945 memberikan kekuasaan besar bagi presiden. Disamping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden juga memegang kuasa membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.
- ✓ Reformasi : 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden. Praktek-praktek yang kurang atau tidak demokratis dihilangkan dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundangan. Adanya UU tentang pemerintahan daerah, Pemilu tahun 1999 dianggap pemilu yang demokratis, jabatan presiden dipertegas, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, mempersulit pemecatan (*impeachment*) presiden oleh MPR.

## LEGISLATIF

Badan Legislatif atau *Legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *Assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People’s Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apa pun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan symbol dari rakyat yang berdaulat.

### ➤ Fungsi

Di antara fungsi badan legislatif yang paling penting adalah :

1. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat Undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang *budget* atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scrutiny, oversight*). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

### ➤ Fungsi Kontrol

Dengan semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif di bidang legislatif, maka perannya di bidang pengawasan dan kontrol bertambah menonjol. Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, yaitu :

#### a. Pertanyaan Parleментар

Anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu masalah. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali badan legislatif Gotong Royong di zaman Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab secara tertulis oleh parlemen yang bersangkutan; pertanyaan parlementer serta jawaban pemerintah tidak banyak efek politiknya.

#### b. Interpelasi

Kebanyakan badan legislatif mempunyai hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di sesuatu bidang. Badan eksekutif wajib memberikan penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak.

Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak interpelasi. Di masa Orde Baru hak interpelasi tidak digunakan. Hak ini kembali digunakan di era Reformasi ketika DPR (2004-2009) mengungkap interpelasi masalah impor beras dan lumpu Lapindo. Usaha anggota dewan ini akhirnya gagal karena tidak memenuhi kuorum.

#### c. Angket (*Enquete*)

Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya memuaskan pendapatnya mengenai soal ini dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.

Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong zaman Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak angket. Namun, hak ini tidak pernah digunakan kecuali oleh anggota DPR masa Reformasi (2004-2009) untuk masalah impor beras.

#### d. Mosi

Umumnya dianggap bahwa hak mosi merupakan hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima suatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet.

Di Indonesia pada sistem parlementer, badan legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai zaman Demokrasi Terpimpin hak ini ditiadakan. Pada masa Reformasi, anggota DPR (1999-2004) menggunakan hak mosi ketika melakukan pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai presiden tahun 2001. Hal ini memang tidak lazim karena umumnya hak ini digunakan dalam sistem parlementer dan bukan sistem presidensial.

### YUDIKATIF

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum yang telah disahkan lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang atau hukum yang telah diizinkan keberadaannya oleh lembaga legislatif. Kekuasaan peradilan semacam ini merupakan salah satu hakikat pemerintahan yang bersifat memaksa.

➤ Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi

**Mahkamah Konstitusi (MK)** berwenang untuk :

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk :
  - Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*Judicial Review*)
  - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
  - Memutus pembubaran partai politik
  - Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
2. Memberi putusan pemakzulan ( impeachment) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

**Mahkamah Agung (MA)** kewenangannya adalah menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

## SISTEM POLITIK

**Sistem** : Suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung.

**Politik**: berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis. Polis adalah kata yang berstatus negara/negara kota yang kegiatannya untuk kelestarian dan perkembangan kotanya. Adapun pengertian politik menurut Ramlan Surbakti adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.



## **Sistem Politik**

### **Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli**

- a. Sukarna → Sistem politik adalah suatu cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh suatu kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, pengaturan negara dengan negara, atau negara dengan rakyatnya.
- b. Robert Dahl → Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan.
- c. David Easton → Sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.
- d. Gabriel Almond → Sistem politik adalah merupakan suatu sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi dan adaptasi yang dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah merupakan fungsi penyesuaian terhadap lingkungan.
- e. Rusadi Kantaprawira → Sistem politik merupakan mekanisme atau cara kerja serangkaian fungsi atau peranan dalam sistem politik yang berhubungan atau sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.

## **Komponen Sistem Politik**

Menurut Samuel P. Huntington komponen sistem politik meliputi:

1. Kultur, yaitu nilai-nilai, sikap, orientasi, mitos, dan kepercayaan yang relevan terhadap politik yang berpengaruh terhadap masyarakat.
2. Struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat yang digunakan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang berwenang.
3. Kelompok, yaitu bentuk-bentuk sosial dan ekonomi, baik formal maupun nonformal, yang berpartisipasi dalam mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap struktur politik.
4. Kebijakan, yaitu pola-pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.

## **Perbandingan Sistem Politik Menurut Gabriel Almond dan David Easton**

David Easton dan Gabriel Almond merupakan dua tokoh ilmuwan politik yang memberi kontribusi pada perkembangan dan perbandingan politik sampai sekarang ini, terkenal dengan pemikiran mereka tentang teori sistem dan sistem politik. Dalam mekanisme sistem politik input terdiri atas tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Tuntutan terhadap sistem politik dapat bervariasi bentuknya, misalnya tuntutan untuk mendapatkan pelayanan yang layak, penghasilan yang layak, keamanan, prinsip-prinsip moral dan sebagainya. Tuntutan merupakan mesin bekerjanya sistem politik dan dalam beroperasi melakukan konversi atas tuntutan itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan otoritatif sebagai outputnya.

## **Konsep Sistem Politik oleh David Easton**

Sistem politik adalah merupakan alokasi dan nilai-nilai dalam mana pengalokasiannya dari nilai-nilai tadi bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan bersifat mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Menurut Easton, suatu sistem politik memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu:

1. Ciri-ciri identifikasi, yaitu dengan menggambarkan unit-unit dasar dan membuat garis batas yang memisahkan unit-unit tersebut dengan lingkungan luarnya.
  - i. Unit-unit sistem politik, yaitu unsur-unsur yang membentuk sistem
  - ii. Perbatasan (garis batas). Yang termasuk sistem politik kurang lebih berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat.
2. Input dan Output  
Agar sistem bekerja dengan baik, dibutuhkan input-input yang mengalir secara konstan. Input akan membuat suatu sistem dapat berfungsi; dan dengan output kita dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu.

Apa yang terjadi di dalam suatu sistem merupakan akibat dari upaya anggota-anggota sistem yang menanggapi lingkungan yang selalu berubah-ubah.

1. Difrensiasi dalam suatu sistem. Anggota-anggota dari suatu sistem paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan itu.
2. Integrasi dalam suatu sistem sosial. Suatu sistem harus memiliki mekanisme yang bisa mengintegrasikan atau memaksa anggota-anggotanya untuk bekerjasama walaupun keadaan minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang otoritatif.

Ada dua jenis pokok input, yang memberikan bahan mentah atau informasi yang akan diproses oleh sistem tersebut dalam suatu sistem politik, yaitu:

1. *Tuntutan*. Tuntutan-tuntutan (berasal dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat) disalurkan dengan suatu usaha yang diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat yang kemudian menjadi input dalam sistem politik. Tuntutan ini terbagi dua, yaitu tuntutan eksternal (luar sistem) dan tuntutan internal (dalam sistem).
2. *Dukungan*. Input dukungan (*support*) menjadi energi untuk menjaga keberlangsungan fungsi sistem politik itu sendiri, yaitu berupa bentuk tindakan atau pandangan yang memajukan dan merintangi suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan didalamnya dan keputusan-keputusan yang dihasilkan.

#### Output-output sebagai Mekanisme Dukungan

Output (keputusan) dari suatu sistem politik merupakan pendorong khas bagi anggota-anggota dari suatu sistem untuk mendukung sistem itu. Dorongan yang bersifat positif maupun negatif. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab tertinggi menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.

#### **Konsep Sistem Politik oleh Gabriel A. Almond**

Menurut Almond, sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka. Sistem itu menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Almond

menggunakan pendekatan perbandingan dalam menganalisa jenis sistem politik, yang mana harus melalui tiga tahap, yaitu:

1. Tahap mencari informasi tentang objek. Ahli ilmu politik memiliki perhatian yang focus kepada sistem politik secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian (unit-unit), seperti badan legislatif, birokrasi, partai, dan lembaga-lembaga politik lain.
2. Memilah-milah informasi yang didapat pada tahap satu berdasarkan klasifikasi tertentu. Dengan begitu dapat diketahui perbedaan suatu sistem politik yang satu dengan sistem politik yang lain.
3. Dengan menganalisa hasil pengklasifikasian itu dapat dilihat keteraturan (regularities) dan hubungan-hubungan di antara berbagai variabel dalam masing-masing sistem politik.

Menurut Almond ada tiga konsep dalam menganalisa berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur dan fungsi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi. Sistem politik merupakan organisasi yang didalamnya masyarakat berusaha merumuskan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam sistem politik terdapat lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.

Ciri dalam sistem politik menurut Gabriel A. Almond:

- a. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. Dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai sistem politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling fleksibel sekalipun.
- b. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur.
- c. Semua struktur politik baik pada masyarakat yang primitif maupun modern melaksanakan banyak fungsi.
- d. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semua modern atau primitif, melainkan dalam pengertian kebudayaan, semua campuran antara unsur modern dan unsur tradisional.

### **Analisis Konsep Sistem Politik menurut David Easton dan Gabriel A. Almond**

Keunggulan dari kedua ragam pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond antara lain adalah:

1. Dalam membuat analisa politik, Easton dan Almond selalu peka akan kompleksitas antara sistem politik dengan sistem sosial yang lebih besar, yang mana sistem politik adalah sub-sistemnya.
2. Kesederhanaan pendekatan. Konsep ini dapat dipakai untuk menganalisis berbagai macam sistem politik demokrasi atau otoriter, tradisional atau modern, dan sebagainya. Konsep Easton dan Almond berasumsi bahwa suatu sistem memproses komponen-komponen yang sama sehingga kedua pendekatan itu bermanfaat dalam upaya mencari metode analisi dan perbandingan sistem politik yang seragam.

3. Konsep yang diajukan oleh Almond memberi arahan untuk mencari data baru yang dapat meluaskan cakrawala perhatian ke masyarakat non-Barat dan non-“modern”.

Kelemahan dari konsep atau pendekatan yang dikembangkan oleh Easton dan Almond:

1. Analisis yang dikemukakan (baik sistem maupun structural-fungsional) tidak memberikan rumusan yang terbukti secara empirik (tidak ada menghasilkan teori)
  2. Tidak menjelaskan hubungan sebab akibat. Kedua pendekatan itu lebih menitikberatkan pada penjelasan analisi.
  3. Analisis structural-fungsional Almond memiliki masalah ketidakjelasan konsep tentang fungsi. Almond tidak menjelaskan garis-garis yang membatasi fungsi-fungsi dalam masyarakat politik.
  4. Kedua pendekatan itu dikritik karena sangat dipengaruhi oleh ideologi demokrasi-liberal Barat. Terlihat jelas pada asumsi Almond yang mengatakan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sistem politik di Barat pasti juga ada di sistem non-Barat.
  5. Obsesi Almond tentang ekuilibrium dan kestabilan telah membuat keliru tentang manfaat yang mungkin terdapat dalam dis-ekuilibrium seperti revolusi atau perang kemerdekaan. Dis-ekuilibrium bisa dipakai untuk menciptakan keadaan sosial, ketika cara-cara konvensional tidak mungkin dilakukan. Contohnya perang kemerdekaan melawan penjajah atau pemberontakan melawan kediktatoran.
- ➔ Pendekatan Sistem Politik Almond sama dengan Pendekatan Sistem Politik Easton, namun lebih komprehensif dengan Input, tuntutan, dukungan, proses politik, fungsi politik (partai politik), lingkungan internal dan eksternalnya.

## **DEMOKRASI**

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti rakyat dan "Kratos" yang berarti kekuasaan. Secara bahasa Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat (pemerintahan rakyat). Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi

dipegang oleh rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah.

Pengertian demokrasi menurut beberapa pakar yaitu

- Abraham Lincoln : Menurut dia, pengertian demokrasi yaitu sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat.
- Charles Costello : Menurut Charles Costello, pengertian demokrasi yaitu sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum serta rutinitas membuat perlindungan hak-hak perseorangan warga negara
- C. F. Strong : Demokrasi menurut pengertian C. F. Strong yaitu satu system pemerintahan di mana sebagian besar anggota dewan dari orang-orang turut dan dalam politik atas basic system perwakilan yang menanggung pemerintah pada akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada sebagian besar itu.
- Hannry B. Mayo : Menurut Hannry B. Mayo, pengertian demokrasi yaitu kebijaksanaan umum ditetapkan atas dasar sebagian besar oleh wakil-wakil yang dipantau dengan cara efektif oleh rakyat dalam beberapa penentuan yang didasarkan dari prinsip persamaan politik serta diselenggaran dalam situasi dimana berlangsung kebebasan politik.
- Samuel Huntington : Menurut dia, demokrasi yaitu para pembuat ketentuan kolektif yang paling kuat dalam satu system diambil lewat satu penentuan umum yang adil, jujur serta berkala serta di dalam system itu beberapa calon bebas berkompetisi untuk peroleh suara serta hampir semua masyarakat dewasa bisa diberikan suara

## **Macam-Macam Demokrasi**

### **a. Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat**

- ✓ Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*): Pengertian demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Demokrasi langsung, rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya.
- ✓ Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*): Pengertian demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi tidak langsung, rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga

dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dengan menajd perantara seluruh rakyat.

#### b. Macam-Macam Demokrasi Berdasarkan Fokus Perhatiannya

- ✓ Demokrasi Formal: Pengertian demokrasi formal adalah demokrasi yang berfokus dari bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi
- ✓ Demokrasi Material: Pengertian demokrasi material adalah demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
- ✓ Demokrasi Gabungan: Pengertian demokrasi gabungan adalah demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi.

### **Ciri-Ciri Demokrasi**

Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi - Ciri-ciri demokrasi digambarkan dalam suatu pemerintah didasarkan atas sistem demokrasi adalah sebagai berikut

- ✓ Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
- ✓ Ciri Kontitusional, yaitu mengenai kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan di konstitusi dan undang-undang negara.
- ✓ Ciri Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan dari beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
- ✓ Ciri Pemilihan umum, Yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan
- ✓ Ciri Kepertaian, yaitu partai menjadi sebuah sarana atau media sebagai bagian pelaksanaan sistem demokrasi
- ✓ Ciri kekuasaan, yaitu terdapat pembagian dan juga pemisahan kekuasaan
- ✓ Ciri Tanggung Jawab, yaitu dengan adanya tanggung jawab baik pihak yang telah terpilih dapat ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi

### **Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi**

Kelebihan/Keuntungan Demokrasi

- ✓ Pemegang kekuasaan dipilih menurut suara dan keinginan rakyat

- ✓ Mencegah adanya monopoli kekuasaan
- ✓ Kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat ikut serta dalam sistem politik

#### Kekurangan/Kelemahan Demokrasi

- ✓ Kepercayaan rakyat dapat dengan mudah digoyangkan melalui pengaruh-pengaruh misalnya media
- ✓ Kesetaraan hak dianggap tidak wajar karena menurut para ahli, setiap orang memiliki pengetahuan politik yang tidak sama
- ✓ Konsentrasi pemerintah yang sedang menjabat akan memudar disaat dekatnya pemilihan umum berikutnya

#### Nilai-Nilai Demokrasi

Demokrasi memiliki nilai-nilai antara lain sebagai berikut:

- ✓ Menjamin tegaknya keadilan
- ✓ Menekan adanya penggunaan kebebasan seminimal mungkin
- ✓ Adanya pergantian kepemimpinan dengan teratur
- ✓ Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
- ✓ Menjamin terselenggaranya perubahan yang terjadi di masyarakat dengan damai atau tanpa adanya gejolak
- ✓ Mengakui dan menganggap wajar adanya perbedaan atau keanekaragaman.

#### Demokrasi di Indonesia

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

2. Sistem Konstitusional: Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah *Rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Sesudah tertumpasnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 sudah terang bahwa yang kita cita-citakan itu adalah demokrasi konstitusional, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam masa Demokrasi Terpimpin kita sedikit banyak telah terpengaruh oleh beberapa konsep komunis berkat kelihaihan PKI untuk menyusupkan konsep-konsep dari alam pikiran komunisme ke dalam kehidupan politik kita pada masa pra-G 30 S/PKI. Maka dari itu perlu kiranya kita menjernihkan pikiran kita sendiri dan meneropong dua aliran pikiran utama yang sangat berbeda, bahkan sering bertentangan serta berkonfrontasi satu sama lain, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berdasarkan Marxisme-Leninisme. Perbedaan fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang tunduk kepada Rule of Law. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*), dan yang bersifat totaliter.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengaiami pasang surut. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai, ataupun militer.



Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat di bagi dalam empat masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa Reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

### **SOSIALISASI POLITIK**

Tujuan sosialisasi politik menurut David Easton dan Jack Dennis adalah untuk memantapkan sistem politik itu sendiri. Dengan diserapnya nilai-nilai politik atau orientasi-orientasi politik dari suatu sistem politik, maka diharapkan bahwa warganegara mempunyai seperangkat pengetahuan atau seperangkat nilai yang diperlukan untuk mendukungnya terpeliharanya sistem politik.

#### **Pengertian Sosialisasi Politik**

- **Menurut Michal Rush dan Philip Althoff** Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.
- **Menurut Gabriel Almond** Sosialisasi adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik,, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Jadi sosialisasi politik menunjukkan pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Di samping itu sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya proses ini disebut *transmisi kebudayaan*.

### **Proses dan Metode Sosialisasi Politik**

Perkembangan sosiologi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan,, seperti "keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka", bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda itu mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik.

Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu sebagai berikut.

- i. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi.

- ii. Perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
- iii. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
- iv. Perkembangan perbedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

Menurut Rush dan Althoff Metode Sosialisasi Politik ada tiga yaitu:

1. Imitasi → Imitasi merupakan Peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak. Pada remaja dan dewasa, imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya.
2. Instruksi → Instruksi merupakan peristiwa penjelasan diri seseorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang instruktif sifatnya.
3. Motivasi → Motivasi merupakan proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman individu.

Jika imitasi dan instruksi merupakan tipe khusus dari pengalaman, sementara motivasi lebih banyak diidentifikasi dengan pengalaman pada umumnya. Sosialisasi politik yang selanjutnya akan mempengaruhi pembentukan jati diri politik pada seseorang dapat terjadi melalui cara **langsung** dan **tidak langsung**. Proses tidak langsung meliputi berbagai bentuk proses sosialisasi yang pada dasarnya tidak bersifat politik tetapi dikemudian hari berpengaruh terhadap pembentukan jati diri atau kepribadian politik. Sosialisasi politik langsung menunjuk pada proses-proses pembentukan orientasi-orientasi yang di dalam bentuk dan isinya bersifat politik.

Proses sosialisasi politik tidak langsung meliputi metode berikut:

1. Pengoperasian Interpersonal → Mengasumsikan bahwa anak mengalami proses sosialisasi politik secara eksplisit dalam keadaan sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam hubungan-hubungan dan pemuasan-pemuasan interpersonal.
2. Magang → Metode belajar magang ini terjadi karena perilaku dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di dalam situasi-situasi non politik memberikan keahlian-keahlian dan nilai-nilai yang pada saatnya dipergunakan secara khusus di dalam konteks yang lebih bersifat politik.

3. Generalisasi → Terjadi karena nilai-nilai sosial diperlakukan bagi objek-objek politik yang lebih spesifik dan dengan demikian membentuk sikap-sikap politik tertentu.

Proses sosialisasi langsung terjadi melalui:

1. Imitasi → Merupakan mode sosialisasi yang paling ekstensif dan banyak dialami anak sepanjang perjalanan hidup mereka. Imitasi dapat dilakukan secara sadar dan secara tidak sadar.

2. Sosialisasi Politik Antisipatoris → Dilakukan untuk mengantisipasi peranan-peranan politik yang diinginkan atau akan diemban oleh aktor. Orang yang berharap suatu ketika menjalani pekerjaan-pekerjaan professional atau posisi sosial yang tinggi biasanya sejak dini sudah mulai menggunakan nilai-nilai dan pola-pola perilaku yang berkaitan dengan peranan-peranan tersebut.

3. Pendidikan Politik → Inisiatif menggunakan orientasi-orientasi politik dilakukan oleh “socialiers” daripada oleh individu yang disosialisasi. Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya. Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu sistem politik. Di satu pihak, warga Negara memerlukan informasi minimal tentang hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki untuk dapat memasuki arena kehidupan politik. Di lain pihak, warga Negara juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa jauh hak-hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi, stabilitas politik pemerintahan dapat terpelihara.

4. Pengalaman Politik → Kebanyakan dari apa yang oleh seseorang diketahui dan diyakini sebagai politik pada kenyataannya berasal dari pengamatan-pengamatan dan pengalaman-pengalamannya didalam proses politik.

### **Agen-agen Sosialisasi Politik**

Sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga dan untuk mengenal agen-agen sosialisasi politik menurut Gabriel Almond yaitu:

1. *Keluarga*. Pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun yang tidak langsung merupakan struktur sosialisasi. Pertama yang dialami seseorang, karenanya sosialisasi keluarga sangat kuat dan kekal.
2. *Sekolah*. Sekolah memberikan ilmu pengetahuan terhadap individu, sehingga individu tersebut lebih menyadari akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih

memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik, dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya.

3. *Kelompok pergaulan*. Melalui pergaulan dengan teman-temannya, individu tersebut secara sadar maupun tidak sadar dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di lingkungan pergaulannya.
4. *Pekerjaan*. Termasuk organisasi-organisasi formal maupun non-formal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan.
5. *Media massa*. Selain memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa politik, juga menyampaikan nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakatnya.
6. *Kontak-kontak politik langsung*. Partai politik, kampanye, pemilihan umum, krisis politik luar negeri, perang dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan individu atau suatu kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi.

## **Sosialisasi Politik di berbagai Negara**

### **1. Di Negara Liberal**

Sosialisasi politik di negara liberal merupakan salah satu sebagai pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik.

### **2. Di Negara Totaliter**

Sosialisasi politik di negara totaliter merupakan indoktrinasi politik. Indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan penuh disiplin, partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik.

### **3. Di Negara Berkembang**

Menurut Robert Le Vine berpendapat bahwa “sosialisasi politik pada negara berkembang cenderung mempunyai relasi lebih dekat pada sistem-sistem lokal, kesukuan, etnis, dan regional daripada dengan sistem-sistem politik nasional”. Ada 3 faktor penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang, yaitu :

- i. Pertumbuhan pendidikan di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk memodernisasi kelompok tradisional lewat industrinalisasi dan pendidikan.
- ii. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisional.
- iii. Mungkin pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional.

#### 4. Di Masyarakat Primitif

Proses sosialisasi politik pada masyarakat primitif sangat bergantung pada kebiasaan dan tradisi masyarakatnya, dan berbeda pada tiap suku. Sosialisasi politik pada masyarakat primitif sangat tergantung pada kebiasaan dan tradisi masyarakatnya, dan berbeda pada tiap suku.